



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANI HENDIARTI
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
3. NHK : 628339

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/270 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/126 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 162.000.000

1. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HADIAH Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 334.182.876**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 5.092.432.876**III. HUTANG** Rp. 405.223.648**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.687.209.228

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.